

## **BAB 4**

### **TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN**

Keberhasilan calon legislatif yang meraih suara tertinggi di Daerah Pemilihan (Dapil) Tuban 3 yang terdiri dari kecamatan Soko, Semanding, Grabagan dan Rengel tentunya merupakan buah kerja keras dari tim sukses yang dibentuk politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa tersebut. Salah satu tugas penting tim sukses yaitu sebagai perantara dalam meraih suara di kalangan konstituen dengan melakukan pertukaran berupa barang dan jasa antara pemilik suara dan kontestan pemilihan calon legislatif. Pada umumnya, praktek ini terjadi pada masa kampanye. Idealnya, kader partai politik merupakan tulang punggung dari mesin politik tim sukses. Namun faktanya, dalam kemenangan calon legislatif faktanya tim sukses didominasi oleh pihak – pihak informal di luar partai. Dalam kemenangan ini menunjukkan bahwa pihak – pihak informal ini dianggap lebih efektif dalam memobilisasi suara dan menjalankan praktek klientelisme. Pada konteks pemilihan calon legislatif DPRD Kabupaten Tuban, Kepala Desa dilibatkan untuk menjadi bagian dari tim sukses dari kandidat sebagai broker politik. Berdasarkan hasil rekapitulasi menyatakan bahwa kandidat berhasil meraih 10.698 suara, hanya selisih kurang dari 200 suara dari calon dengan raihan terbanyak, Fahmi Fikroni dengan 10.894 suara. Bab ini akan berfokus pada pembahasan bagaimana sejatinya kemunculan dukungan dari kepala desa yang berada di Dapil Tuban 3 sehingga berhasil mengantarkan kandidat duduk menjadi anggota dewan di Kabupaten Tuban.

#### **4.1 Awal Mula Keterlibatan Kepala Desa sebagai Broker Politik**

Proses Pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg) Kabupaten 2019 dimulai dengan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 21 September 2018. Sebanyak 569 bakal calon legislatif oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) disahkan sebagai peserta pemilihan calon legislatif. Sedangkan untuk masa kampanye dimulai pada tanggal 24 Maret hingga 13 April 2019. Sedangkan pemungutan suara dilakukan pada 17 April 2017. Rentang waktu selama kurang dari sebulan tersebut dimanfaatkan oleh para peserta pemilu untuk bekerja keras

meyakinkan konstituen untuk memberikan suaranya saat tanggal pencoblosan. Pilcaleg 2019 merupakan keikutsertaan untuk yang pertama kalinya bagi kandidat melalui Partai Kebangkitan Bangsa sebagai kendaraan politiknya. Kandidat bergegas membentuk tim sukses untuk memuluskan langkahnya menuju gedung parlemen. Tim sukses ini terdiri dari beberapa kader PKB, namun didominasi oleh di luar lingkaran partai, yaitu berbagai elemen lapisan masyarakat.

Aspinal dan Berenschot (2019) menyebut bahwa pelibatan tim sukses yang berasal dari luar kader politik disebut dengan broker. Salah satu pertimbangan melibatkan broker adalah karena lemahnya dorongan peserta pemilu untuk mengandalkan jejaring pribadi mereka sendiri selama proses pemilu berlangsung, yaitu mulai dari masa kampanye hingga pemungutan suara. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada umumnya struktur partai memainkan peran yang kurang signifikan dalam menjalankan kampanye kala pemilihan umum berlangsung (Buehler, 2009; Mietzner, 2011). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Buehler dan Tan (2007) di Sulawesi Selatan tentang pelibatan para broker yang berunsur dari para tokoh agama, tuan tanah besar dan birokrat. Para elemen masyarakat tersebut bertugas membagi – bagikan barang – barang kepada masyarakat sebagai upaya meraih simpati para pemilih. Dalam konteks klientelisme, peran partai – partai politik terbatas hanya sebagai salah satu alternatif jejaring yang digunakan oleh peserta pemilu atau dalam artian lain bukan satu – satunya jejaring dominan yang tersedia (Aspinall dan Berenschot, 2019).

Keberadaan tim sukses yang terdiri dari pihak informal menjadi salah satu kunci sukses kemenangan kandidat. Hal yang sangat beralasan karena kader politik juga terserap ke kandidat lainnya dan militansi dari luar kader politik terbukti lebih efektif dalam mendulang suara. Salah satu yang “berjasa” dalam kemenangan Moh. kandidat adalah keterlibatan para Kepala Desa dalam meyakinkan para konstituen. Hanya ada dua kandidat yang memperoleh suara melebihi 10 ribu suara, salah satunya adalah kandidat. Kepala Desa dilibatkan sebagai mesin politik melalui dua pertimbangan. *Pertama*, kepala desa memiliki

pengaruh hingga di tataran akar rumput. Hal ini menjadi penting karena kandidat bisa menggunakan jejaring kepala desa untuk mendistribusikan bantuan hingga ke lapisan paling bawah yang menjadi calon pemilih kandidat. *Kedua*, pelibatan kepala desa sebagai broker didasari oleh pertimbangan bahwa untuk memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Setidaknya terdapat tiga bukti terjadinya praktek klientelisme yang melibatkan para kepala desa sebagai mesin politik. Pertama, pada umumnya masyarakat Kabupaten Tuban bermata pencaharian di bidang agraria sehingga kelompok masyarakat ini menjadi target utama dalam memobilisasi suara pemilih dengan cara memfokuskan memberikan bantuan dalam bidang pertanian. Dalam konteks ini, kandidat memberikan bantuan pupuk kepada Kelompok Tani di beberapa dusun di beberapa Kecamatan di Daerah Pilihannya. Pendistribusian bantuan ini juga melibatkan para kepala desa yang bertugas sebagai jembatan antara kandidat dengan konstituen. Hal ini juga menunjukkan adanya aktivitas mobilisasi pemilih bahwa kepala desa merestui kandidat yang diusungnya, mulai dari masa kampanye hingga pencoblosan nantinya.

Fenomena di atas juga dibuktikan oleh Auyero (2000) dengan mengambil kasus di Argentina dimana kandidat mengalokasikan sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan melibatkan broker. Dalam konteks penelitian ini, kepala desa memainkan peranan penting karena baik kandidat maupun calon pemilih meyakini bahwa broker merupakan orang yang dipercaya dalam mendistribusikan bantuan serta merekomendasikan kandidat yang mampu memenuhi harapan masyarakat. *Kedua*, motivasi pribadi masing – masing kepala desa untuk mendapatkan keuntungan, seperti ekonomi. Hubungan antara kandidat dengan kepala desa ini terjalin karena dalam jangka panjang akan saling menguntungkan, tergantung *event* politik yang tengah berlangsung. Hal ini bisa menjadi investasi bagi kepala desa untuk menjadi modal berkontestasi dalam pemilihan kepala desa periode berikutnya atau menjadi pihak yang mendistribusikan bantuan sosial yang diperoleh kandidat, misalnya pada masa reses anggota legislatif. Ketiga, dukungan kepala desa oleh salah satu kandidat ini

juga merupakan ungkapan balas budi atas bantuan di masa lalu dan upaya membina jejaring politik di tingkat lokal.

Kehadiran kepala desa sebagai bagian dari tim sukses dalam pemilihan anggota legislatif Kabupaten Tuban 2019 menjadi bukti paling nyata adanya praktek klientelisme. Kedua belah pihak, yaitu kandidat dengan kepala desa ini saling mempertukarkan sumber daya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Tluwe Kecamatan Soko.

“Ada dukungan dalam kegiatan warga, baik dalam bentuk uang maupun barang. Jadi hal ini menunjukkan komitmen pak Saefulloh kepada warga, jadi ketika memperkenalkan ke warga saya tidak ragu kalo pak Saefulloh adalah caleg yang layak dipilih. Kalo ada wujudnya *koyo ngene*, saya ga perlu *jelasne ngoyo – ngoyo* mas, warga masyarakat melihat sendiri. Harapannya kalo sudah jadi banyak hal yang bisa dibantu.” (Wawancara dengan A. Sidik, 2023).

Contoh di atas menjadi faktor ketiga dimana kandidat memenuhi kebutuhan masyarakat yang didistribusikan oleh kepala desa yang bertindak sebagai broker. Selama proses kampanye memang kandidat dikenal memenuhi kebutuhan tim sukses maupun beberapa pengajuan bantuan oleh masyarakat. Di sisi lain juga, dalam beberapa waktu lalu pada saat pemilihan Kepala Desa juga kandidat memberikan bantuan kepada kepala desa yang membantunya untuk memenangkan kontestasi pemilihan Kepala Desa. Dukungan ini tidak hanya terjadi kala agenda politik saja, namun secara konsisten kandidat merawat jejaring konstituennya dengan berbagai bantuan. Misalnya pavingisasi di sebagian jalan di desa Tluwe Kecamatan Soko. Hal ini menjadi modal penting bagi kandidat yang kembali maju menjadi anggota legislatif di Daerah Pemilihan Tuban 3.

Ketiga, selama menjadi caleg, kandidat juga tak segan – segan mengeluarkan dana pribadinya untuk membantu perangkat desa. Salah satunya adalah bantuan sekolah bagi anak kepala desa atau perangkat desa. Hal ini tergantung dari kebutuhan penerima atau kondisi finansial kandidat. Di sisi lain, kandidat juga kerap membantu jika terdapat hajatan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Bantuan ini tentunya disalurkan lewat kepala desa dan diteruskan

kepada panitia penyelenggara hajatan. Pendekatan yang konsisten dilakukan oleh kandidat menyebabkan masyarakat atau setidaknya tokoh di masyarakat dapil Tuban 3 secara tidak langsung nantinya membantu memenangkannya. Melalui pengamatan peneliti, beberapa warga juga mengetahui seberapa besar kontribusi kandidat di wilayahnya sehingga kehadirannya terasa di masyarakat.

Salah satunya di desa Rengel yang kini dipimpin oleh bapak Mundir. Dalam penjelasannya, kandidat menepati janjinya setelah dinyatakan terpilih menjadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Tuban periode 2019 – 2024. Dari awal pencalonannya, Mundir telah berkomitmen untuk membantu legislator PKB ini untuk bisa meraih suara maksimal di wilayahnya. Tak membutuhkan waktu lama, kandidat langsung memberikan bantuan alat pertanian, seperti traktor, pupuk dan kebutuhan lainnya. Atas pemenuhan janji politik kandidat ini, maka Mundir tidak ragu – ragu untuk kembali membantu kemenangannya untuk kedua kalinya di pemilihan caleg 2024 tahun depan.

kandidat menggunakan momen pemberian bantuan ini tidak hanya untuk memenuhi janji politiknya, namun juga sebagai agenda bertemu dengan pengurus Gapoktan atau konstituennya. Ia meninjau langsung bantuan yang diberikan agar sesuai dengan permintaan dan tepat sasaran. Hal ini juga dimanfaatkan sebagai jaring aspirasi bagi perangkat desa atau lapisan masyarakat lainnya untuk mengajukan proposal bantuan. Pendekatan semacam ini terbukti efektif untuk menyentuh hati calon pemilihnya karena kandidat menyediakan waktu untuk berkomunikasi dan menerima keluh kesah masyarakat dan juga mendengarkan kebutuhan masyarakat, baik dalam hal infrastruktur maupun dukungan lainnya. Ridwan, salah satu tokoh pemuda di desa Soko menjelaskan keseriusan kandidat dalam merealisasikan bantuannya tanpa warga harus menunggu lama dan proses yang berbelit.

Pak Saefulloh kalo lagi ketemu masyarakat, mesti banyak *disambati* dan dibales dengan senyuman, ngerti *paleng masalahe wargane akeh* hahaha. Mulai dari ibu – ibu pengajian yang minta seragam, anak muda yang dibantu alat olahraga, macem – macem

mas. *Untunge* ya beliau memahami kondisi di masyarakat. Kalo misalnya nominalnya terjangkau, biasanya beliau dalam beberapa hari mencairkan bantuannya. Saya denger kalo gitu berarti pake dana pribadinya. Kadang kalo ada yang meninggal dan dari keluarga miskin, dari tim atau perangkat desa ada yang ngirimin bantuan sembako. Hal – hal *koyo ngono kuwi sing diiling* masyarakat mas. *Wong – wong iki lek kenek atine wes sembarang dikekno*. Betul kan ya mas? (wawancara dengan Ridwan, 2023).

Cahyo, salah satu tim pemenang kandidat menjelaskan bahwa calon legislatif yang didukungnya tidak hanya mengandalkan dana hibah maupun dana bantuan sosial (bansos) tapi juga lewat keuangan pribadi calon. Hal ini menunjukkan bahwa kandidat secara aktif untuk memberikan bantuan, baik bantuan untuk sumbangan warga maupun pembangunan desa. Secara otomatis masyarakat mengapresiasi kinerjanya selama menjabat 5 tahun belakangan. Hal ini pula yang semakin mempererat hubungan dengan beberapa kepala desa yang sudah terjalin beberapa tahun, baik sebelum mencalonkan diri hingga kini di akhir masa jabatan dan kembali bertarung memperebutkan kursi di DPRD Kabupaten Tuban.

Dalam penelitian Stokes (2005) menunjukkan bagaimana aktivitas broker dalam memenangkan kandidat yang didukung. Broker yang dimotori oleh kepala desa ini berhasil disebabkan oleh para kepala desa mampu memastikan penyaluran sumber daya (bantuan) memberikan dampak bagi elektabilitas calon yang didukung. Klientilistik sebagai sebuah strategi yang berhasil karena kemenangan kandidat tidak hanya karena mesin politik yang bekerja keras, salah satunya lewat para kepala desa namun juga mendapatkan legitimasi dari masyarakat. kandidat di mata masyarakat menjadi kandidat yang layak dipilih karena yang sering memberi bantuan kepada masyarakat. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya sungkan yang tertanam dalam masyarakat Jawa kebanyakan. Hal ini sesuai dengan yang dituturkan oleh Sugianto, Kepala Desa Pandan Wangi Kecamatan Soko.

Masyarakat ketika saya membagikan bantuan bertanya, “*Niki soko sinten pak?* Nah dari situ saya menjelaskan bahwa ini dari pak

Saefulloh. Trus saya bilang, “*Pak Bu, pak Saefulloh enten hajat mangke pas pemilu. Nyuwun tulung mangke dicoblos nggih?*” Saya bilang gitu mas. Saya enteng aja ngomongnya karena ini buktinya nyata, bantuannya ada, penerimanya jelas. Saya yakin masyarakat juga tidak keberatan untuk mendukung pak Saefulloh karena bantuannya ada di tangan, dipegang saat itu juga. Jadi saya sebenarnya ngarahin warga relatif gampang mas. Saya ga merasa susah karena takut menjanjikan warga ternyata bantuannya ga cair trus jadi omongan kalo bantuannya *dientit* (diambil) pak kades. Saya juga ada kepentingan untuk menjaga konstituen saya dan maju pilkades lagi, lha mosok aku marai wargaku kecewa? Kalo sudah begini, ibaratnya mesin ini sudah panas mas, tinggal mau dibawa kemana tinggal tancap gas aja. Kalo ada calon lain yang masuk ya pasti puter balik atau ya lewat jalur lain karena saya dan perangkat desa sudah satu komando, satu visi dan misi mengamankan suara pak Saefulloh. (Wawancara dengan Sugianto, 2023).

Dukungan para kepala desa yang menjadi broker politik dalam pemenangan kandidat yang diusung dalam pilcaleg 2019 tidak cukup hanya dipandang sebagai praktek dan strategi klientilisme saja, namun hal ini terjalin karena ikatan yang kuat secara personal antara para kepala desa dan kandidat. Melalui penuturannya, Sugianto menjelaskan bahwa hubungan yang terjalin bukan hanya karena urusan politik semata namun juga karena memang atas dasar “persaudaraan” untuk saling tolong menolong.

“Sampeyan mesti paham, endi wong sing mung butuhe thok utowo sing beneran pengen bangun seduluran. Sampeyan kan iling ya mas, bantuan pas mertuane pak Ali (salah satu perangkat desa) meninggal ga nganti suwi pak Saefulloh langsung marani rumah duka karo gowo bantuan sembako. Sing koyo kuwi iki pasti bakal diiling dan lebih efektif dalam meyakinkan warga untuk memilih pak Saefulloh. Ngono kan yo disawang tonggo kanan kiri. Menurutku ini kampanye sing efektif mas, menyentuh hati rakyat, menunjukkan kepedulian wakil rakyat kepada warganya. (Wawancara dengan Sugianto, 2023).

Ikatan yang kuat antara kandidat dengan Kepala Desa ini tidak hanya sebatas transaksional, namun dalam faktanya juga menunjukkan adanya ikatan persaudaraan seorang Kepala Desa, M.A.S yang tidak hanya bertindak sebagai broker namun sebagai kerabat atau saudara yang membantu saudara lainnya. Kemenangan kandidat yang mampu meraih suara 7.205 suara “hanya” di kecamatan Suko tidak bisa dilepaskan dari andil M.A.S sebagai

kepala desa. Ketokohan yang dimiliki oleh M.A.S mampu memberikan kemenangan mutlak kandidat. Hal ini diakui oleh kandidat dimana kinerja broker dengan ketokohan yang bersangkutan menjadi salah satu faktor kesuksesannya meraih satu kursi di DPRD Kota Tuban.

“Jelas ya mas kalo pak Ali menjadi donatur terbesar suara saya waktu menang kemarin. Dari awal saya maju hingga coblosan pak Ali yang ngawal dan mengkondisikan warganya. Sebagai pemilik sekolah dan pengusaha, pasti setiap warga percaya sama arahan pak Ali. Jadi saya berhutang besar sama pak Ali yang mau membantu saya, tidak hanya suara tapi juga dana kampanye ke masyarakat.” (Saefulloh, 2023).

Tentu saja para kepala desa ini tidak bergerak sendirian untuk memenangkan kandidat, bersama dengan kandidat para kepala desa juga melibatkan elemen masyarakat agar kampanye semakin efektif dan dampaknya meluas. Bagi kaum perempuan, para kepala desa ini melibatkan beberapa kader dari Muslimat dan Fatayat, badan otonom (banom) dari organisasi islam, Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai kader PKB, tentu saja kandidat mendapatkan kemudahan menjaring kader dari kedua organisasi perempuan NU tersebut. Hal ini juga diikat dengan kedekatan ideologis yang dipersatukan oleh identitas yang sama, yaitu kader NU. Kader Muslimat dan Fatayat menjadi strategis karena aktivitasnya menggelar kegiatan secara rutin, baik dari pengajian, pendidikan maupun aktivitas lainnya dalam rangka pemberdayaan perempuan.

Kesediaan para kepala desa mendukung kandidat tidak hanya didasari oleh motif ekonomi saja, namun juga reputasi dari kandidat. meski kandidat tergolong muda namun telah merintis karir politiknya sejak masih remaja. Hal ini menjadi modal bagi kandidat untuk membangun jejaring politiknya di kabupaten Tuban. Tak hanya aktif di organisasi di bawah naungan NU, ia juga menjadi ketua Persatuan Setia Hati Terate (PSHT). PSHT merupakan salah satu organisasi silat terbesar yang ada di Pulau Jawa dan terkenal solid dengan kaderisasi yang berjalan secara terus menerus. Hal ini menunjukkan modal yang dimiliki kandidat untuk merangkul berbagai elemen menjadi mudah karena



keaktifan kandidat di berbagai komunitas di masyarakat. Lewat dua organisasi ini, kandidat mampu menjangkau konstituen hingga di level dusun hingga RW (Rukun Warga) maupun Rukun Tangga.

Kelompok masyarakat yang dilibatkan sebagai bagian dari tim pemenangan kandidat ini juga menunjukkan bahwa kader partai politik yang kurang efektif untuk memenangkan kandidat. Di internal PKB sendiri tentu terjadi gesekan karena dalam sistem pemilihan tertutup sesama kader partai yang menjadi calon legislatif harus bersaing satu sama lain untuk meraih suara konstituen. Maka tentu saja hal ini tidak efektif untuk mengandalkan mesin politik dari kader partai. Pada pemilihan calon legislatif 2019, terdapat 12 caleg yang berkompetisi di dapil Tuban 3. Nama – nama *incumbent* seperti Yusuf, Mujari dan Nurul Huda menjadi nama caleg PKB yang di pilcaleg sebelumnya meraih kursi di DPRD Kabupaten Tuban. Hal ini bukanlah tugas mudah untuk menandingi perolehan politisi senior dari partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar itu. Kompetisi ini juga akhirnya menyebar di akar rumput dimana para kandidat mencoba “melamar” para tokoh masyarakat maupun para kepala desa untuk mau menjadi tim suksesnya. Harap diketahui bahwa persaingan di level DPRD setingkat kota/kabupaten merupakan persaingan yang ketat karena banyaknya kontestan dengan wilayah yang relatif kecil. Maka pertempuran di level bawah sangatlah menentukan kemenangan para kandidat. Hal ini juga menunjukkan bahwa bukanlah hal yang efektif untuk menggunakan kader partai menjadi mesin politik karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa tokoh masyarakat dan kepala desa ini memiliki pengaruh yang lebih nyata dalam memobilisasi konstituen. Para tokoh masyarakat dan kepala desa yang sering terlibat dalam kontestasi politik ini juga dianggap memiliki kemampuan dalam memetakan warganya sehingga perhitungan politik dan pergerakan lawan semakin mudah untuk diketahui. Pada akhirnya, hasil menunjukkan bahwa kandidat memiliki tim pemenangan yang lebih unggul dengan dibuktikan perolehan tertinggi di dapilnya, mengalahkan perolehan para seniornya di partai yang lebih dulu berkompetisi di pemilihan calon legislatif Kabupaten Tuban.

#### **4.2 Peran dan strategi Kepala Desa sebagai Mesin Politik Kandidat pada Pileg Kabupaten Tuban 2019**

Dalam subbab ini, peneliti menjabarkan peran dan strategi yang digunakan para kepala desa sebagai broker mengantarkan kandidat meraih kursi di Kabupaten DPRD Tuban. Kemenangan kandidat ini menjadi salah satu kasus dimana seorang pendatang baru di kontestasi pileg di level kabupaten/kota dimana kandidat mampu memenangkan pileg dengan memanfaatkan mesin politik di luar struktur partai. Fakta lapangan menunjukkan bahwa tim pemenangan yang dibentuk kandidat secara efektif mampu memobilisasi suara pemilih. Berdasarkan pengamatan peneliti kala turun ke lapangan menemui sejumlah informan, ditemukan fakta bahwa para kepala desa memiliki pendekatan yang beragam. Selama proses kampanye, terdapat kepala desa yang bertugas mempersuasi dan menjadi kepanjangan tangan dari kandidat dalam menjelaskan profil dari kandidat yang diusung kepada para pemilih. Tahapan berikutnya memberikan gambaran peran kepala desa dalam menggerakkan pemilih untuk memilih kandidat. Di bagian akhir bagaimana peran kepala desa dalam pembelian suara.

Dalam konteks kabupaten Tuban, kepala desa memainkan peranan penting dalam kontestasi politik. Salah satu tugas utamanya adalah memobilisasi para pemilih. Dalam istilah Aspinall dan As'ad (2015) para kepala desa ini disebut dengan state broker atau broker yang berasal dari unsur Negara. Jejaring kepala desa dirawat dan dimanfaatkan oleh partai politik atau kandidat kala politik elektoral tiba. Kepala desa sebagai state broker dan juga memiliki jejaring yang mampu menjangkau masyarakat di akar rumput adalah gambaran ketokohan perwakilan pemerintah di mata masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan warganya. Kepala desa merupakan hasil dari proses politik di mana masyarakat memilihnya kala Pemilihan Kepala Desa. Hal ini memberikan kepala desa legitimasi untuk mengambil keputusan – keputusan penting, salah satunya adalah terkait politik elektoral. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka kepala desa-lah yang mampu mendistribusikan patronase dari kandidat.

Bagi Aspinal dan As'ad (2015) kepala desa merupakan sosok yang familiar di mata warganya. Para kepala desa ini juga terlibat dalam kemenangan kandidat, salah satunya adalah dengan menjadi tim pemenangan dan membentuk jejaring kampanye hingga di tingkat dusun. Tentu saja pembentukan dan keterlibatan para kepala desa ini memastikan kemenangan kandidat dalam pilcaleg 2019. Selain kontrak politik, hal ini juga didasari bahwa jalinan kerjasama kedua belah pihak akan berjalan dalam jangka waktu panjang, saling bahu – membahu dalam pilcaleg dan pilkades berikutnya. Hal ini untuk memastikan dalam politik elektoral memastikan para pemilih untuk tetap loyal kepada arahan kandidat yang disodorkan oleh broker. Untuk merawat loyalitas warga, kepala desa bertugas mendistribusikan bantuan baik bantuan pembangunan infrastruktur maupun dana hibah yang dikelola oleh komunitas untuk memberdayakan masyarakat sekitar. Demi merawat loyalitas pemilih juga dalam pemberian sumber daya ini, kepala desa menjelaskan perjuangan kandidat sebagai wakil rakyat telah berjuang untuk kemajuan daerah pilihannya.

Kepala desa memiliki keterlibatan penting dalam politik elektoral, baik dalam konteks pilkada maupun pilcaleg. Pentingnya peran kepala desa sebagai broker karena pemahamannya sebagai aktor politik di wilayahnya. Maka dalam pilcaleg, kepala desa menjadi magnet bagi para kandidat kontestan Pilcaleg untuk memobilisasi dan memberikan suaranya kepada kandidat yang direkomendasikan oleh kepala desa. Tentunya tidak semua kandidat mampu mengakses dan merekrut kepala desa sebagai bagian dari timnya. Setidaknya terdapat dua pertimbangan seorang kandidat mampu meyakinkan kepala desa masuk ke tim pemenangannya. *Pertama*, modal kapital dimana kandidat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan kepala desa baik dalam barang maupun jasa. Selama masa kampanye, kandidat menjadi kandidat yang kerap mengucurkan sumber dayanya untuk membantu kebutuhan masyarakat. Dilihat dari struktur tim yang dimiliki juga menunjukkan kemampuan finansial kandidat dalam menyediakan logistik selama musim kampanye. Harap diketahui bahwa menjadi tim pemenangan adalah sebuah “profesi dadakan” dalam politik elektoral di Indonesia.

*Kedua*, modal sosial dimana kandidat merupakan sosok yang dikenal oleh masyarakat. Kandidat bukanlah nama asing di daerah pemilihan Tuban 3. Selain aktif di berbagai badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Tuban, kandidat juga aktif di organisasi masyarakat lain, seperti PSHT. PSHT memiliki keanggotaan yang merata di seluruh Kabupaten Tuban. Kandidat mampu menggabungkan organisasi yang berlatar agama dan memiliki basis massa yang kuat dan mengakar, baik di level lokal maupun nasional. Belum lagi hal ini ditunjang dengan aktivitas istri dari kandidat yang aktif di badan otonom NU Muslimat yang terkenal militan dan memiliki kegiatan rutin, seperti pengajian tiap minggunya. Dua modal penting ini menjadi pondasi penting kemenangan dan juga memberikan kemudahan bagi broker untuk memobilisasi pemilih ke kotak suara.

Kedekatan masyarakat yang dibina oleh kandidat ini tidak hanya kala masa kampanye saja. Kandidat merawat hubungan dengan masyarakat sejak terpilih hingga kini. Tentu saja terdapat motif politik di dalamnya, namun di sisi lain pendekatan ini mengena di hati masyarakat karena nyaris tidak ada anggota legislatif dari Dapil 3 Tuban yang turun langsung untuk menyapa masyarakat. Kandidat dikenal cukup rain untuk menghadiri acara – acara yang diadakan di daerah pilihannya dan juga turut menyumbang baik uang maupun barang. Selain itu, kandidat juga menjalin kedekatan personal dengan para kepala desa lewat bantuan kala para kepala desa kembali berkontestasi di pemilihan kepala desa. Hal inilah yang menumbuhkan hubungan emosional antara kandidat sebagai kandidat dengan para kepala desa sebagai broker. Hal inilah yang semakin membuat para kepala desa untuk mendukung dan mengampanyekan kandidat merupakan kandidat yang peduli dan dekat dengan masyarakat sehingga layak untuk dipilih dalam pilcaleg berikutnya. Upaya para kepala desa untuk mempersuasi masyarakat memilih kembali kandidat merupakan bagian dari kampanye dan propaganda untuk terus menjaga dan meningkatkan elektabilitas kandidat di mata masyarakat.

Kedekatan dengan kandidat diakui beberapa kepala desa memberikan keuntungan berupa akses sumber daya untuk didistribusikan kepada

masyarakat. Dalam strategi klientelisme, sumber daya menjadi sarana bagi para kepala desa untuk memobilisasi pemilih. Skema ini menjelaskan betapa besarnya pengaruh para kepala desa di mata masyarakat karena penguasaan terhadap sumber daya yang nantinya didistribusikan kepada pemilih dan siapa saja yang berhak menerima bantuan. Kemampuan mengakses sumber daya ini membuat para kepala desa mampu mengendalikan pemilih sehingga kepala desa mampu memobilisasi pemilih untuk menjatuhkan pilihannya kepada kandidat yang direkomendasikan agar para pemilih dapat terus mendapatkan bantuan selama kandidat menduduki posisi penting di pemerintahan. Yang tak kalah penting bahwa hal ini menunjukkan bahwa kepala desa adalah penguasa dan juga pengayom warganya lewat akses yang dimiliki kepada partai politik atau kandidat.

Kepala desa yang memiliki otoritas dalam kehidupan warganya bisa dilihat bagaimana struktur pemerintahan Kabupaten yang berbeda dengan pemerintahan di Kota. Otoritas kepala desa di Kabupaten diperoleh melalui proses pemilihan yang melibatkan warga, yaitu lewat pemungutan suara. Sedangkan dalam struktur pemerintahan Kota, Lurah (yang setara kepala desa) dipilih oleh walikota. Maka dari sinilah para kepala desa memiliki otoritas dan legitimasi politik dari warganya sehingga kandidat memandang posisi kepala desa penting dalam mendistribusikan sumber dayanya. Dalam menyalurkan bantuan kepada pemilih, para kepala desa ini menyempatkan untuk memberikan penjelasan bahwa bantuan yang didapat melalui kepala desa ini merupakan perjuangan kandidat sebagai wakil rakyat untuk membantu menyelesaikan masalah warganya.

Dalam masa kampanye pilcaleg 2019, kandidat bersama tim rutin untuk turun lapangan safari politik ke desa – desa dimana para kepala desa yang mendukungnya dan terlibat dalam tim kampanye. Para kepala desa ini selama kampanye menjadi mediator antara kandidat dengan pemilih agar kandidat secara langsung mendengarkan kebutuhan masyarakat yang menjadi calon pemilihnya. Pendekatan semacam ini adalah strategi agar pemilih

menyaksikan secara langsung bahwa kandidat adalah pribadi yang mau mendengar keluh kesah masyarakat dan bersungguh – sungguh untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warganya. Selain itu juga, cara ini ingin menunjukkan bahwa masyarakat bisa leluasa mengutarakan kebutuhannya kepada kandidat. Agar menancap dalam ingatan pemilih, para kepala desa ini selalu mengingatkan secara berulang – ulang bantuan sumber daya yang diberikan merupakan usaha dan kepedulian kandidat kepada warganya. Selama pengamatan di lapangan, peneliti melihat bahwa cara kepala desa mengingatkan berulang kali kepada para pemilih mampu membangun keyakinan di masyarakat untuk memberikan suaranya kepada kandidat. Beberapa masyarakat masih mengingat bantuan infrastruktur jalan yang diperjuangkan oleh kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa kandidat memiliki kesungguhan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kandidat juga memfasilitasi dan mendanai forum agar masyarakat mampu menyampaikan aspirasinya. Hal ini menunjukkan kedekatan emosional antara pemilih dan kandidat dan komitmen kandidat sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan kebutuhan pemilihnya.

Pertemuan dan aktivitas turun langsung menjumpai pemilih ini menjadi bahan bagi kampanye kepala desa untuk membangun citra kandidat sebagai sosok yang dekat dan merakyat. Kegiatan semacam ini juga sebagai cara bagi kepala desa untuk terus mengingat kandidat sebagai sosok yang benar – benar bekerja bagi rakyat. Melalui pembangunan citra positif dan distribusi sumber daya ini, maka terjalin hubungan emosional antara kandidat dengan pemilih. Kondisi yang demikian ini menunjukkan kepala desa sebagai mesin politik berhasil menanamkan kesan wakil rakyat yang baik dan nantinya mampu mendatangkan keuntungan elektoral bagi kandidat. Dalam penelitian Aspinal dan Berenschot (2019) menjelaskan bahwa membangun kesan sebagai pemimpin yang merakyat, ditandai dengan pendekatan informal dan dekat dengan rakyat, tanpa disertai dengan upacara resmi atau seremonial dan menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengeluarkan keluh

kesahnya dan mampu menyediakan kebutuhan bagi masyarakatnya.

Telah dibahas sebelumnya, bahwa kepala desa memegang peranan penting dalam memenangkan partai politik atau caleg yang diusung karena kepala desa memiliki jejaring yang mengakar kuat di masyarakat pedesaan. Keberadaan kepala desa dalam politik elektoral ini menjadi signifikan karena proses yang dilalui kepala desa dengan memenangkan legitimasi warga membuat posisinya dilirik oleh berbagai partai politik atau kandidat yang berkontestasi di pemilihan calon legislatif, salah satunya untuk bertugas sebagai distributor sumber daya untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang mendorong hampir seluruh kepala desa memainkan peran sebagai broker politik. Berenschot (2015) menyatakan bahwa otoritas yang dimiliki kepala desa, khususnya sebagai distributor ini memiliki implikasi bahwa kepala desa berhak untuk memutuskan siapa saja yang memperoleh maupun diabaikan dalam mengakses bantuan, misalnya penerima bantuan sosial dari pemerintah. Maka, demi menjaga maupun mengamankan posisinya, masyarakat tunduk terhadap arahan maupun rekomendasi kepala desa dalam politik elektoral.

Di awal keinginannya maju sebagai calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Pekerjaan Rumah yang harus dilakukan oleh kandidat adalah membangun tim pemenangan yang terdiri dari berbagai elemen dengan komando para kepala desa. Salah satu tantangan adalah meyakinkan kepala desa yang telah menyatakan dukungannya kepada calon lainnya. Maka, kandidat meyakinkan beberapa kepala desa dengan bantuan untuk menunjukkan komitmennya dalam merawat jejaring broker dan masyarakat. Perlu investasi dan kerja keras untuk mampu membangun tim yang solid karena beberapa tokoh masyarakat maupun kepala desa sudah direkrut oleh kandidat lain. Selama kampanye pilcaleg 2019, terdapat dua citra yang dibangun dan diulang – ulang oleh tim untuk melekatkan kandidat sebagai wakil rakyat, yaitu citra seorang pemuda yang bersih dan merakyat. Citra seorang pemuda yang bersih ini dibangun untuk menunjukkan bahwa

kandidat merupakan sosok yang tidak berbuat curang. Hal ini untuk menepis anggapan bahwa bantuan yang selama ini diberikan nantinya akan diganti selama menjabat sebagai anggota DPRD. Citra yang kedua yaitu sosok yang merakyat, hal ini untuk memaksimalkan keunggulan kandidat yang memang sejak dari remaja telah aktif berorganisasi dan sering berkegiatan bersama masyarakat. Hal ini juga yang menjadi pembeda antara dirinya dengan kandidat lainnya. Dua citra ini telah cukup untuk mengantarkan sosok kandidat untuk mampu mendulang suara di dapil Tuban 3 dan mampu menjadi peraih suara dengan perolehan terbanyak kedua dalam pilcaleg 2019 kemarin.

Uraian di atas menunjukkan bahwa keberhasilan kandidat dalam memenangi kontestasi pilcaleg 2019 tidak mampu terlepas dari peran penting para kepala desa. Kepala desa secara gencar terus mengampanyekan kepada warganya untuk mendukung kandidat sebagai wakil rakyat yang mewakili Kecamatan Rengel, Soko, Semanding dan Grabagan yang termasuk dalam Dapil Tuban 3. Sebagai caleg baru, tentunya kampanye semacam ini dibutuhkan untuk bertarung memenangi tiap suara yang diperebutkan puluhan caleg di tiap dapil. Kandidat yang mengikuti pertarungan politik untuk pertama kalinya ini berada di posisi yang kurang menguntungkan karena harus berhadapan dengan beberapa kandidat petahana. Namun lewat peran kepala desa dalam kampanye dan memobilisasi pemilih mengantarkan kandidat menuju kursi DPRD Kabupaten Tuban. Suara yang diperoleh kandidat tidak tanggung – tanggung, di kecamatan Soko ia mampu memperoleh suara sebesar 7.205, perolehan tertinggi seorang caleg dalam sebuah kecamatan. Hal ini merupakan sebuah prestasi bagi kandidat yang merupakan kandidat baru dalam kontestasi pemilihan calon legislatif.

Selama masa kampanye, tidak hanya kepala desa yang bertugas memobilisasi massa. Maka direkrutlah berbagai anggota yang memiliki pengaruh di masyarakat. Dalam kerangka broker politik, tim yang dibentuk merupakan eksternal partai karena dianggap lebih efektif dalam memobilisasi



massa. Pembentukan tim ini juga di bawah arahan kepala desa karena kepala desa yang mengetahui peta politik di wilayahnya. Setelah membangun jejaring politik hingga di level bawah. Dalam pembentukan jejaring broker ini, nampak dua pola yang muncul, yaitu tim yang terbentuk atas kekerabatan kepala desa yang juga memiliki posisi terpandang di masyarakat dan jejaring tim pemenang yang digunakan para kepala desa dalam kontestasi pilkades. Kedua jejaring ini ditangani langsung oleh kandidat karena masukan dan informasi yang diberikan nantinya akan ditindaklanjuti dengan strategi berikutnya. Kedua jejaring ini diperlakukan sama, yaitu bantuan yang relatif sepadan untuk mendistribusikan sumber daya yang dimiliki oleh kandidat. Tim yang terbentuk ini telah berpengalaman, baik di level pilkades maupun di level kabupaten seperti pilcaleg dan pilkada. Jejaring politik inilah yang menjadi konsultan politik kandidat dalam memenangi kontestasi politik di pilcaleg 2019. Menurutnya, merekrut tim yang berpengalaman membuatnya tidak hanya efektif namun juga efisien.

“Mungkin orang ngira wong – wong iki duwek tok mas. Sebenere mereka iki kerjone itung – itungane jelas, selama sampeyan ga nggenggem (menggenggam alias perhitungan dalam mengeluarkan uang, pen.) kene iki pengeluarane ya jelas. Karena di awal rincian dana berapa yang aku keluarkan terhitung dengan baik, ya karena mereka ini berpengalaman kebutuhannya apa, bayaran piro. Karena ini bukan bancakan tapi ya jangka panjang mas. Ojok sampe iki cuma mari sampe kene tok soale iki tarikane jek dowo (wawancara dengan Saefulloh Ponco Eko, 2023).”

Hal ini menunjukkan bahwa kandidat mempercayakan pergerakan timnya melalui jejaring broker yang berada di luar struktur maupun afiliasi dengan partai politik kandidat beranung. Faktanya terbukti bahwa membawa kemenangan dengan suara tertinggi kedua di dapil Tuban 3. Hal ini membuktikan pula penggunaan jejaring broker ini membuat alokasi sumber daya kandidat efektif karena selain tepat sasaran juga meminimalisir kebutuhan yang memerlukan anggaran yang tidak sedikit, seperti merekrut konsultan politik.

Untuk memantau kinerja tim yang direkrutnya kandidat perlu untuk turun tangan melihat bagaimana jejaring brokernya bekerja. Melibatkan pihak luar struktur partai menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan karena hal ini menyangkut penguasaan kandidat terhadap “medan perang” yang harus dimenangkannya. Sebagai seorang politik, memanfaatkan jejaring broker yang berbasis kepercayaan semacam ini adalah hal lumrah untuk melibatkan orang lain untuk membantunya untuk meraih suara di akar rumput. Dalam perspektif Aspinall dan Berenschot (2019) jejaring yang dibentuk kandidat menjadi modal politik yang penting karena kewajiban, keintiman dan kontrol sosial diantara kandidat dan broker mampu memfasilitasi pertukaran klientelistik.

Meskipun mengakui bahwa jejaring broker yang dimanfaatkannya tergolong efektif, namun ada satu catatan penting dalam melihat kemampuan seseorang memobilisasi pemilih di akar rumput. Jika seorang tokoh masyarakat atau kerabat kepala desa yang dilibatkan ini hanyalah orang yang mengurus organisasi namun tidak memiliki pengalaman dalam kontestasi politik maka bergabungnya mereka ke dalam tim hanyalah untuk memanfaatkan momentum pilcaleg ini demi meraih keuntungan pribadi. Patut dipahami bahwa pertarungan di level pilcaleg tergolong berat karena wilayah yang kecil namun harus diikuti oleh kontestan yang jumlah menyentuh angka ratusan. Maka lambat laun kandidat dan kepala desa mampu menentukan siapa saja yang mampu menggerakkan pemilih di akar rumput atau hanya menugaskan beberapa orang untuk mengurus teknis kampanye. Di sinilah peran kepala desa untuk menyeleksi anggota timnya agar tim berjalan secara efektif.

Tim yang dibentuk oleh kepala desa ini tentunya telah mengakar hingga di level RT/RW. Terbentuknya tim ini bisa jadi memanfaatkan tim pemenangan pilkades maupun rekrutmen baru menyesuaikan dinamika di lapangan. Nantinya setiap anggota tim atau tokoh masyarakat di level bahwa memobilisasi sejumlah pemilih dengan memberikan uang, sembako atau

dengan cara mempersuasi beberapa orang. Salah satu anak muda yang dilibatkan dalam tim pemenangan kandidat, yaitu Iwan menyatakan bagaimana dia beserta timnya masuk dan berupaya mempersuasi pemilih di akar rumput.

“Setiap hari kami ditarget untuk bertemu dengan warga. Yang anak muda menysar anak muda, yang ibu – ibu pengajian datang ke pengajian. Nanti dilaporkan ke ketua tim, siapa saja yang sudah didatangi, lokasinya di mana, sekaligus bertanya apakah ada yang sudah berkampanye di daerah sini. Kalo belum ya pertemuan berikutnya kami datang lagi bawa bantuan, kalo kebetulan bisa ya ngajak mas Saefulloh sekalian.” (Wawancara dengan Iwan, 2023)

Dalam pengamatan peneliti, memang kandidat bisa dibilang menguasai medan, khususnya kecamatan Soko dimana dia memperoleh suara mencapai angka tujuh ribuan. Selain itu, keberadaan posko yang dibuat juga memberikan kesempatan bagi warga untuk bisa datang dan menyaksikan kegiatan yang dilakukan oleh tim beserta kandidat. Tak jarang dalam seminggu sekali kandidat dan tim mengundang berbagai elemen masyarakat untuk berdiskusi maupun menampung aspirasi masyarakat. Aktivitas yang terbangun semacam ini membuat antara pemilih dan kandidat terjalin ikatan emosional karena pada umumnya menjadi pejabat publik kerap kali membangun sekat antara wakil rakyat dengan pemilih. Hampir 24 jam selama masa kampanye posko ini terbuka bagi masyarakat.

Para tim yang terlibat dalam pemenangan kandidat, baik yang berasal dari kerabat kepala desa maupun tokoh masyarakat dirawat dengan baik dengan memberikan keuntungan. Beberapa di antara mendapatkan bantuan sembako, akses terhadap bantuan sosial, bagi yang memiliki usaha mendapatkan bantuan kredit, pinjaman untuk kebutuhan rumah tangga dan keuntungan lainnya yang biasanya dalam bentuk uang, barang atau jasa secara langsung. Selama masa kampanye berlangsung, kandidat menyediakan kebutuhan kampanye untuk mempromosikan dirinya dengan menggunakan merogoh kocek sendiri tanpa adanya dukungan dari pihak lain maupun partai politik.

Pembentukan tim yang dikawal oleh kepala desa ini berdasarkan pertimbangan bahwa para anggota tim yang dilibatkan menguasai peta politik dan mampu melakukan kalkulasi politik. Pengalaman bertarung di pilkades dan juga pilcaleg sebelumnya menjelaskan bagaimana anggota mampu memetakan suara yang ada di wilayah kandidat maju sebagai caleg dan terbukti kemampuan ini yang mendatangkan kemenangan bagi kandidat. Pertimbangan inilah yang mendorong agar kandidat tidak memerlukan konsultan politik atau pihak lain yang di luar daerah pemilihannya. Selain itu juga adanya ketidakpercayaan kepada konsultan politik karena dianggap orang baru yang tidak mengerti seluk beluk dapil Tuban 3 (Saefulloh, 2019). Maka strategi terbaik dalam berkontestasi di pilcaleg adalah dengan memanfaatkan jaringan politik yang sudah ada dan berpengalaman.

kandidat juga menyatakan bahwa tim yang dibentuknya ini melalui seleksi orang – orang terpercaya, seperti kepala desa dan dianggap memiliki kesetiaan dan dapat dipercaya. Hal inilah yang menjadi pondasi praktek klientelistik karena mensyaratkan pertukaran kedua belah pihak. Rekrutmen yang dilakukan oleh kepala desa ini didasarkan pada jejaring politik yang digunakan pada pilakdes sebelumnya. Kepala desa memiliki rekam jejak anggotanya. Salah satu perintah bagi para anggota adalah dengan melaporkan perkembangan suara yang diperoleh di tiap desa dan dusun di tempat anggota tim pemenangan tinggal. Apabila terdapat target yang meleset dari perkiraan, maka anggota tim harus segera mencari tahu masalahnya dan mencari solusi secara bersama – sama. Jika kondisi ini tidak berubah maka tentu saja distribusi sumber daya menjadi tersendat karena merupakan hal yang sia – sia mengalokasikan sumber daya namun tidak mampu memberikan sumbangsih suara. Dampak lainnya, anggota tim yang berada di wilayah tersebut mendapatkan pengurangan dalam mendistribusikan sumber daya yang juga berdampak pada besaran keuntungan yang diperolehnya (Saefulloh, 2019).

Mobilisasi yang dilakukan oleh tim pemenangan sebagai bagian dari struktur broker politik ini mengandalkan unsur kepercayaan dan kepatuhan. Kepercayaan menjadi pondasi awal hubungan antara kandidat dengan

jejaring broker, dimana kandidat memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan tim dan bantuan bagi pemilih (Iwan, 2023). Adanya kepercayaan ini menimbulkan keyakinan di dalam diri broker bahwa kandidat tidak akan bertindak semena – mena dan meyakini bahwa kandidat bersungguh – sungguh untuk memenangi kontesasi pilcaleg. Maka sebagai anggota tim sudah selayaknya untuk patuh terhadap instruksi ketua tim karena telah memenuhi kebutuhan dirinya dan tim, juga untuk memperoleh reputasi baik bagi sebuah jejaring politik yang sukses memenangkan kontesasi politik.

Tim pemenangan yang dibentuk melalui jaringan kekerabatan kepala desa dan tim pemenangan pada masa pilkades menunjukkan terjalinnya hubungan emosional yang erat dan tanggung jawab dari pemilih atas dasar kesepakatan tersebut.

Menurut Berenschot (2015) kebermanfaatan dan kebermaknaan bagi para pemilih menjadi faktor penting dalam keberhasilan politik yang didasarkan pada kemampuan merajut jejaring sosial. Kandidat sebagai ketua tim pemenangan yang didukung oleh para kepala desa menjadi pribadi yang disegani oleh anggotanya karena komitmen dalam mengalokasikan sumber daya dan reputasi serta pengalamannya dalam kontesasi politik.

Sudah disadari oleh para pelaku politik elektoral bahwa kemenangan politik praktis tidak bisa dilepaskan dalam kemenangan politik. Hal ini juga diakui oleh kandidat.

“Masyarakat juga tahu mas kalo ikut pilcaleg ya kudu bondo. Misale turun ke masyarakat terus ga bawa apa – apa ya bagi masyarakat yang cuma omong *thok*. Ya kalo gitu tiap turun ke warga kudu bawa sesuatu, nah sesuatu itu kan harus dibeli pake uang. Tingal dikalikan aja berapa kali saya turun bertemu dengan warga. Itu belum ngitung seperti rekom partai, dan lain sebagainya.”

Lebih lanjut, kandidat juga menyadari bahwa visi dan misi, program partai maupun kebijakan apa yang dikawal nantinya ketika terpilih tidak akan berdampak banyak dalam mempengaruhi pilihan masyarakat. Sebagus apapun visi dan misi yang dibuat, jika seorang kandidat tidak memiliki uang

maka perjalanan menuju kantor DPRD Kabupaten akan jauh lebih berat. Hal ini juga didukung oleh Kamsiana, kepala desa Wadung Kecamatan Soko.

“Setiap pemilihan pastinya perlu ongkos, mas. Semakin kecil levelnya biasanya semakin sengit pertarungannya maka semakin besar modalnya. Jadi tiap suara sangat berharga, apalagi pas pilkades karena suara yang diperebutkan cuma ribuan. Setiap datang ke sebuah kelompok atau tokoh, selain meminta dukungan juga pasti memberikan bantuan sejumlah uang. Untuk nominalnya tidak ada angka tertentu, disesuaikan dengan pasarannya saja. (wawancara dengan Kamsiana, 2023).

Broker dalam prakteknya memang sekelompok orang yang terlibat aktif dalam kontestasi politik. Mereka menjadikan momen politik elektoral untuk menunjukkan kemampuannya dalam memenangkan kandidat yang diusungnya. Broker yang sudah malang melintang akan disegani karena kemampuannya dalam membuat perhitungan dan dukungan politik. Mereka inilah yang bertindak sebagai konsultan politik dengan cara mengatur strategi dan memberikan masukan kepada kandidat mengenai cara meyakinkan pemilih dan meraih suara di daerah pilihannya. Strategi yang dilakukan oleh para broker politik ini memiliki perbedaan dengan konsultan politik yang biasanya berlatar dari kaum akademisi. Broker politik ini memanfaatkan jejaring politik yang mengakar di akar rumput dan otoritas yang dimiliki oleh para kepala desa. Melalui pengalaman dari berbagai kontestasi politik ini para broker memiliki kalkulasi dengan ketepatan yang tinggi. Seperti disinggung sebelumnya, kepercayaan dan kepatuhan menjadi faktor penting karena tidak menutup kemungkinan jika broker memperlakukani kandidat karena ketidaktahuannya dalam penguasaan lapangan dan keterbatasannya ini dimanfaatkan oleh broker untuk meraih keuntungan pribadi. Momentum politik semacam ini seringkali mengundang individu oportunis untuk memanfaatkan akses yang dimiliki demi meraup keuntungan pribadi. Namun dalam kemenangan kandidat sebagai anggota legislatif Kabupaten Tuban potensi semacam ini bisa dicegah.

Kandidat tentu saja tidak sepenuhnya bisa mengendalikan jejaring broker yang terdiri dari kerabat para kepala desa dan orang – orang pilihan kepala desa.

Maka dari awal kesepakatan terjalin, kandidat meyakinkan diri sebagai sosok yang royal kepada kepala desa dan siap mengalokasikan bantuan kepada kepala desa dan nantinya disalurkan kepada masyarakat. Selama masa kampanye hingga pencoblosan, kandidat terus berupaya memenuhi kebutuhan timnya, baik dalam konteks kampanye maupun di luar kampanye seperti bantuan kemanusiaan bagi keluarga tim yang membutuhkan. Hal ini dirasa sudah cukup bagi para kepala desa untuk yakin bahwa hubungan yang terjalin antara kandidat dan kepala desa bukan hanya semata – mata transaksional namun juga kerjasama antara kedua belah pihak dengan tujuan yang sama.

Besarnya ongkos politik elektoral ini dipicu lantaran adanya mekanisme *vote buying* atau pembelian suara. Terdapat dua strategi yang dilandasi dengan motif yang berbeda, yaitu core-voter model atau model pemilih inti, yaitu pembelian suara dengan cara memberikan uang oleh partai kepada pendukung inti untuk memobilisasi mereka agar hadir pada hari pemilu (Nichter, 2008; Stokes et al., 2013; Aspinall et al., 2015). Sedangkan strategi lainnya yaitu swing-voter approach atau pendekatan pemilih yang belum menentukan pilihan, yaitu pembelian suara sebagai sebuah strategi yang berupaya mempengaruhi pemilih yang tidak memiliki komitmen (Stokes, 2005).

Selain strategi kampanye, kandidat dan tim pemenangan juga memikirkan cara untuk melakukan praktek pembelian suara, salah satunya adalah dengan cara menentukan pemilih, baik secara individu maupun kelompok yang berhak mendapatkan uang dan juga cara tim pemenangan melakukan kalkulasi suara hingga di level dusun. Strategi ini menjadi mungkin dilakukan karena dilakukan oleh pelaku – pelaku yang sudah berpengalaman dalam kontestasi politik, dalam hal ini adalah pemilihan kepala desa di Kabupaten Tuban.

Untuk melancarkan strategi pembelian suara, maka tim pemenangan membentuk anggota hingga di level dusun (A. Sidik, 2023). Meskipun tim ini terbentuk ketika kandidat memutuskan maju pada pilcaleg 2023, namun sebenarnya individu – individu yang terlibat di dalamnya adalah orang – orang yang telah kenyang pengalaman dalam politik lokal. Jejaring yang terbentuk

hingga di level dusun ini merupakan kombinasi antara jejaring kepala desa lewat jalur kekerabatan dengan anggota pemenangan yang membantunya dalam kontestasi pemilihan kepala kades. Struktur jaringan pembelian suara ini mengikuti instruksi yang dibuat oleh kepala desa dan kandidat dan kesuksesan strategi ini bertumpu kemampuan anggota tim menganalisis peta politik di tingkatan dusun.

Terbentuknya struktur hingga di tataran dusun ini nantinya diharapkan mampu memberikan kepastian tentang waktu dan nominal uang yang harus disediakan kandidat untuk melakukan pembelian suara pemilih. Kemampuan anggota tim membaca peta politik di tingkat dusun ini yang menyediakan gambaran seberapa besar tingkat efektivitas pembelian suara dalam mempengaruhi dukungan pemilih kepada kandidat.

Anggota tim yang berada di level dusun ini secara teknis mendata dan mengumpulkan informasi mengenai aktivitas calon legislatif lain yang melakukan kampanye dan pilihan tiap warga dalam pilihan calon legislatif dan juga warga yang belum menentukan pilihannya. Para anggota tim ini diharuskan untuk terus menemui masyarakat untuk mendorong masyarakat untuk memilih kandidat dan terus melaporkan dinamika yang terjadi di wilayahnya, khususnya aktivitas calon legislatif yang berada di Daerah Pilihan Tuban 3. Para kepala desa ini menginstruksikan kepada anggota tim untuk membuat laporan tentang pilihan pemilih hingga di tataran keluarga (Kamsiana, 2023). Maka lewat strategi ini kandidat mengetahui berapa kisaran suara yang telah berhasil diyakinkan dan berapa lagi yang harus diraih agar bisa mencapai target yang diinginkan (Saefulloh, 2023).

Pendataan ini penting untuk mendistribusikan kepada siapa saja pembelian suara ini dilakukan. Dalam mengumpulkan data demi pembelian suara, biasanya hal ini diperoleh dari kepala desa, kemudian alternatif lainnya dengan mengunjungi warung kopi dimana seringkali terjadi pertukaran informasi di level desa maupun dusun dan kunjungan *door to door* anggota pemenangan di level RT dan RW (Iwan, 2023). Selama masa kampanye,



anggota pemenangan diberi tugas untuk mengunjungi sedikitnya dua rumah untuk mengampanyekan kandidat dan menanyakan pilihan legislatif di Kabupaten Tuban. Seringkali masyarakat tidak mengetahui pasti pilihannya karena banyaknya calon legislatif yang ikut berkompetisi. Maka di sinilah kesempatan bagi anggota tim pemenangan untuk memperkenalkan kandidat dan mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada kandidat. Strategi ini merupakan upaya tindak lanjut dari himbauan yang sebelumnya telah dilakukan oleh kepala desa.

Setelah data terkumpul, maka bisa diketahui alokasi uang untuk membeli suara, baik dari lawan yang bertarung di sesama dapil dengan yang belum menentukan pilihan. Penghitungan suara semacam ini menjadi penting untuk memastikan berapa suara yang nantinya diraih oleh kandidat hingga di level dusun. Diharapkan dalam penghitungan ini selisih suara antara data yang dikumpulkan dengan nantinya setelah pengumuman oleh KPUD tidak memiliki selisih yang terlampau jauh.

Dalam menentukan pembelian suara, nominal yang diberikan tidak ada jumlah yang pasti, tergantung dengan motivasi pemberiannya. Jika di wilayah yang mayoritas memutuskan untuk memilih kandidat maka besar nominal sebesar Rp25 ribu sudah dianggap pantas sebagai bentuk ucapan terima kasih telah bersedia memberikan dukungannya kepada kandidat. Sedangkan bagi wilayah yang telah memutuskan untuk memilih lawan politik kandidat dalam pilcaleg kali ini, maka nominal sebesar Rp 50 ribu sudah dianggap mampu mengubah pilihan pemilih.

Secara singkat dapat ditarik kesimpulan dalam bab ini bahwa dalam menjalankan perannya sebagai broker, kepala desa memanfaatkan jejaring politiknya yang tersebar hingga akar rumput. Sebagai pejabat publik, maka konsekuensinya kepala desa memiliki keterbatasan dalam mendukung caleg. Maka dari itu perlunya dibentuk tim pemenangan. Antara kepala desa dan tim pemenangan ini memiliki tugas pokok yang berbeda. Kepala desa menghimbau kepada pemilih untuk memberikan suaranya kepada kandidat. Himbauan ini

didasarkan pada kesungguhan dan komitmen kandidat untuk mengatasi masalah dan pemberian sumber daya kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya bantuan sembako, perbaikan infrastruktur jalan maupun dukungan kepada organisasi masyarakat. Pelibatan kepala desa dalam tim pemenangan merupakan pilihan strategis karena kepala desa dalam struktur politik di Kabupaten memiliki otoritas dan legitimasi dari warga. Selain itu, kepala desa memiliki pemahaman yang kompleks terkait permasalahan yang ada di wilayahnya sehingga kepala desa mampu merumuskan strategi bagi kandidat untuk meraih hati warganya. Dukungan ini juga merupakan bentuk timbal balik atas komitmen kandidat yang sejak awal menunjukkan keseriusannya dalam mendistribusikan sumber daya, baik bagi tim pemenangan maupun warga masyarakat.

Sedangkan jejaring politik yang dibentuk kepala desa yang menjelma menjadi tim pemenangan kandidat, memiliki peran dalam melakukan mobilisasi dan pembelian suara. Hal ini sesuai dengan kapasitas anggota tim pemenangan yang terdiri dari orang – orang yang berpengalaman di level lokal dan mengetahui perilaku dan pilihan pemilih. Atas dasar pemahaman inilah maka anggota tim ini yang paling memahami cara yang paling efektif dalam mendistribusikan uang atau barang kepada para pemilih. Anggota tim pemenangan ini memiliki kemampuan dalam mengetahui pilihan seseorang hingga di level keluarga dan cara untuk mempengaruhi pilihan bagi pemilih yang belum memutuskan pilihannya. Tim pemenangan yang dibentuk melalui jejaring kekerabatan kepala desa dan tim pemenangan yang dibentuk kepala desa di masa pilkades ini tersebar hingga di level RT dan RW.